

**EVALUASI KINERJA PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

Oleh:

Putri Prissilia Pramitha

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study was prepared for evaluating program performance of Unliveable Rehabilitation Home Program in Purbalingga using indicators based on AKIP which are the input, output, outcome, benefit and impact. As in this program there are gaps or constraints that may affect the results of program performance of Unliveable Rehabilitation Home Program in Purbalingga derived from the input, output, outcome, benefit, and impact

The results obtained are that the human resources lacking in terms of quantity, although the existing human resources are appropriate and optimal, overall target number of uninhabitable houses in the district Purbalingga are 27.533 homes, but new in rehab just 100 houses in accordance with appropriate housing ie roof pedestal and wall, this program can not be said to alleviate poverty, overall, the benefits are felt only to the 100 beneficiaries of rehabilitation home, this assistance has not been felt for alleviating poverty because the aid was stimulated and only include one measure, namely board.

So, we may conclude that the performance of unliveable rehabilitation home program in Purbalinggawas good, based on the gains that have been achieved. This program was not the final solution to overcome poverty because it only resolve section of the board. Advice can be given by researcher are that the implementation of the program conducted during dry season, helping each other when collecting document, creating more leaders in society or making certain committee to do implementation on the field outside of the instrument.

Keywords: Performance Evaluation Program, Unliveable Rehabilitation Home

ABSTRAKSI

Penelitian ini disusun untuk mengevaluasi kinerja program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan indikator menurut AKIP yaitu *input, output, outcome, benefit* dan *impact*. Adapun didalam program ini terdapat gap atau kendala-kendala yang dapat mempengaruhi hasil kinerja program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga yang berasal dari input, output, outcome, benefit, dan impact. Penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Informan yang diambil oleh peneliti adalah kepala sub.bidang Kesejahteraan BAPPEDA Kabupaten Purbalingga, kepala bidang seksi Prasarana dan Pnyehatan DPU Kabupaten Purbalingga, TKSK dan masyarakat penerima bantuan RRTLH.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah SDM yang kurang dalam segi kuantitas, meskipun SDM yang ada sudah sesuai dan optimal, target keseluruhan jumlah rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Purbalingga adalah 27.533 rumah namun yang baru di rehab hanya 100 rumah yang sesuai dengan rumah layak huni yaitu atap alas dan dinding, program ini belum dapat dikatakan mengentaskan kemiskinan, secara keseluruhan, manfaat yang dirasakan hanya kepada 100 penerima bantuan rehabilitasi rumah saja, bantuan ini belum terasa untuk mengentaskan kemiskinan karena bantuan ini hanya menstimulan dan hanya mencakup salah satu ukuran yaitu 'papan'

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori program yang baik, meskipun belum merata dan belum dapat dijadikan sebagai solusi permasalahan kemiskinan, karena program ini hanya memiliki dampak pada aspek pengentasan kemiskinan yaitu dalam hal papan.

Kata kunci : Evaluasi Kinerja Program, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah baik di daerah maupun di pusat. Tingkat kemiskinan di suatu wilayah menjadikan suatu ukuran kesejahteraan dari suatu wilayah, oleh karena itu kemiskinan menjadi prioritas pembangunan. Berbagai program kemiskinan telah dibuat serta dilaksanakan sesuai dengan

anggaran yang telah dialokasikan baik dari pemerintah daerah provinsi maupun pusat. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Tahun 2005 pemerintah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan juga dikeluarkan dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada Pasal 3 disebutkan beberapa langkah diantaranya; (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, (4) menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Melihat hal tersebut, pemerintah Kabupaten Purbalingga terus berusaha menyejahterahkan masyarakat daerah Purbalingga dengan harapan dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan diluncurkannya program yaitu Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah program yang ditujukan untuk keluarga miskin yang karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati No 95 tahun 2015. Penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ditetapkan melalui tahapan seleksi dari keluarga miskin yang ada di

desa/kelurahan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Tujuan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) adalah percepatan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi keluarga miskin, pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotong-royongan, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sasaran Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) adalah terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Ada[un indikator Rumah Tidak Layak Huni yaitu alas, atap dan dinding. Tujuan program ini yaitu menjadikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Namun ada perbedaan untuk program ini dari sebelumnya yaitu alokasi dananya, untuk program sebelumnya alokasi dana sebesar Rp.3.000.000 untuk setiap rumah yang terdaftar, sedangkan untuk program RRTLH mengalokasikan dana sebesar Rp.10.000.000,000 untuk setiap rumah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka

setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Adapun kondisi umum yang terlihat pada program rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Purbalingga antara lain:

- *Input*

Masih terdapat kendala terkait SDM dilapangan.

- *Output*

Anggaran yang dialokasikan tahun 2015 10 juta untuk setiap rumah namun alokasi dana hanya 1milyar, dan rumah yang terdata akan di rehab sebanyak 27.533 rumah.

- *Outcome*

Program ini belum dapat dikatakan mengentaskan kemiskinan, secara keseluruhan.

- *Benefit*

Program ini belum merata.

- *Impact*

Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni hanya salah satu program stimulan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Berapa capaian nilai kinerja program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam mencapai keberhasilan berdasarkan indikator kinerja program?

2. Dampak apa saja yang dihasilkan dengan adanya Program Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni?

C. TUJUAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui capaian nilai kinerja program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kab.Purbalingga.

2. Mengetahui dampak dari program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kab.Purbalingga.

D. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Evaluasi kinerja program merupakan suatu kegiatan lanjutan dari pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja, oleh karena itu, didalam mengevaluasi harus memiliki pedoman dan indikator yang disepakati. Evaluasi kinerja program merupakan suatu bentuk *feedback* dari apa yang telah dilakukan untuk meningkatkan produktifitasnya di masa depan, yang dimana proses tersebut berkelanjutan.

Evaluasi kinerja program menjadikan suatu kegiatan untuk menentukan berhasil tidaknya suatu

kegiatan atau program, yang dimana jika dalam penulisan ini berhasil atau tidak dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Keberhasilan disini dapat dilihat apakah hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sejak awal. Adapun ruang lingkup atau tingkatan evaluasi yang dilakukan untuk membuktikan suatu program itu akuntabilitas.

- Evaluasi Kinerja Kegiatan
Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan suatu capaian suatu unit instansi pemerintah dalam suatu waktu. Evaluasi ini menunjukkan suatu keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan yang dimaksud sesuai dengan tujuan dan sasaran pada perencanaan.
- Evaluasi Kinerja Program
Merupakan evaluasi terhadap kinerja dari suatu program yang dimana program disini ialah suatu kegiatan nyata yang dilakukan secara sistematis, tertata, dan dapat dilakukan oleh satu unit atau beberapa unit instansi yang memiliki tujuan didalam pelaksanaannya.

Program Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni adalah program yang ditujukan untuk keluarga miskin yang karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ditetapkan melalui tahapan seleksi dari keluarga miskin yang ada di desa/kelurahan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Indikator keberhasilan dari program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah menjadikan rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, dan meningkatkan kegotongroyongan masyarakat. Diketahui bahwasannya dalam data susenas Kabupaten Purbalingga masih memasuki daerah kurang didalam perekonomiannya, oleh karena itu pemerintah daerah membuat berbagai macam program kemiskinan yang tujuannya untuk membantu ataupun menstimulan para warga kurang mampu agar mendapatkan kebutuhan pokoknya yaitu sandang, pangan dan papan. Salah satu program mengenai papan yaitu Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH). Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

(RRTLH) adalah program yang ditujukan untuk keluarga miskin yang karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu.

Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan dari program tersebut melihat program ini adalah program baru, maka peneliti menggunakan indikator Kinerja AKIP dari LAN yaitu *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan juga *impact*.

- *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan output.
- *Output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan / atau non fisik.
- *Outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah.
- *Benefit* adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Impact adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif

pada setiap tingkatan berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

E. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian diskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. karena tujuannya adalah mendiskripsikan dan menggambarkan apa yang ada mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan menganalisis data secara mendalam dan menyeluruh, yang dimana nantinya diharapkan dapat diketahui seberapa jauh tingkat keberhasilan dari program tersebut, serta dapat melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi baik pendukung maupun penghambat dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Adapun, penelitian ini menggunakan evaluasi formatif yaitu evaluasi setelah program itu dijalankan dengan cara melihat dan meneliti pelaksanaan suatu program, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut (Singarimbun, 1987 : 5). Peneliti melakukan penilaian guna melihat capaian nilai suatu program yang

bersumber dari DRD (Dewan Riset Daerah) Jawa Tengah yaitu :

- a. Menghitung capaian kelompok indikator kinerja
 $\text{Realisasi} : \text{target} \times 100\%$

Tabel 1.2

Tingkat Efektivitas Indikator Kinerja

No	Skor	Kategori
1	<25%	Tidak Efektif
2	26%-50%	Kurang Efektif
3	51%-75%	Efektif
4	76%-100%	Sangat Efektif

Sumber : DRD Jateng

- b. Menghitung kinerja program.
 $\text{Nilai capaian indikator kinerja (kinerja)} \times \text{bobot kinerja} : 100\%$.

Bobot masing-masing indikator kinerja ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan dalam pencapaian target dan tujuan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3

Skoring Bobot Variabel

Variabel	Bobot	Kategori
Input	10	Sangat Memadai
Output	10	Sangat Sesuai
Outcome	20	Sangat Baik
Benefit	25	Sangat Besar
Impact	25	Sangat Besar

Sumber : DRD Jateng

- c. Tingkat keberhasilan program yang telah dilakukan akan di- kategorikan dengan menggunakan kategori nilai capaian indikator yang dikemukakan dewan riset daerah Jawa Tengah (DRD Jateng) sebagai berikut :

Tabel 1.4

Kategori Hasil Evaluasi Program

Nilai	Kategori
87,51-100	Sangat Berhasil
75,01-87,5	Berhasil
62,51-75	Cukup Berhasil
50-62,5	Kurang Berhasil
<50	Tidak Berhasil

Sumber : DRD Jateng

Berdasarkan tabel 1.2, 1.3 dan 1.4 nantinya peneliti akan dapat mengolah nilai suatu program yang dimana program disini ialah program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) sehingga nantinya nilai tersebut akan mengkategorikan program ini seperti apa.

HASIL PEMBAHASAN

1. Evaluasi Kinerja Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga

Input

Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan

outcome. Input memiliki indikator tersendiri didalamnya yang dimana indikator *input* merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur jumlah *input* yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* (melaksanakan kegiatan) dengan meninjau distribusi sumberdaya, suatu lembaga dapat menganalisis kesesuaian alokasi sumberdaya dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

- Kesesuaian Anggaran

Alokasi anggaran program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sudah dialokasikan dalam Perbup nomor 95 tahun 2015. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) merupakan program baru yang di formulasikan sebagai pengganti program terdahulu yaitu PSPRGAKIN yang sudah diberikan kepada desa dikarenakan ada UU Desa. Berbeda dengan program PSPRGAKIN terdahulu dimana setiap rumah mendapatkan bantuan sebesar 3 juta, program Rumah Tidak Layak Huni memiliki anggaran sebesar 1milyar di tahun 2015 yang dimana alokasi tersebut diperuntukkan bagi 100 rumah dengan alokasi dana masing-masing rumah sebesar 10 juta, dan tahun 2016 akan dialokasikan dana sebesar 17 milyar hal ini disebabkan karena

program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) masuk kedalam APBD Perubahan sehingga alokasi danannya hanya 1milyar.

- Bentuk Program optimal

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan program baru yang dibuat oleh BAPPEDA Kabupaten Purbalingga, yang dimana program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan program pengganti dari PSPRGAKIN. Program ini muncul dikarenakan program yang terdahulu kurang optimal. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni diharapkan akan menjadi suatu program yang optimal karena program ini merupakan program hasil evaluasi dari program serupa sebelumnya.

- Seluruh Instrumen Mendampingi serta Kecukupan Biaya

Instrumen didalam pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yaitu Fasilitator pemberdayaan TKSK, Fasilitator Teknis, tim teknis, Bappeda serta DPU. Seluruh instrumen tersebut memiliki tupoksinya masing-masing. Bappeda memiliki tugas untuk merumuskan, DPU untuk pelaksana teknis, TKSK pelaksana teknis kepanjangan tangan dari DPU, Tim teknis yang berasal dari

Desa, serta Fasilitator teknik yang didapatkan melalui rekrutmen.

- Proses Pencapaian Tujuan

Sebelum dilaksanakannya suatu program tentunya terdapat beberapa proses terlebih dahulu yang dimana proses tersebut dimulai dari pendataan rumah yang sudah dimulai sejak tahun 2014, setelah itu adanya verifikasi dokumen, pengajuan proposal yang dibuat oleh desa, pencairan dana, pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dan monev (monitoring dan evaluasi). Proses yang dilakukan cukup panjang, mengingat untuk memperoleh data rumah tidak layak huni di 18 kecamatan yang ada di Purbalingga dibutuhkan waktu yang cukup lama. Pendataan ini yang nantinya akan di *cross check* kembali sehingga data yang dimiliki oleh BAPPEDA nantinya akan *valid*. Selain itu, data tersebut dipergunakan untuk melihat skala prioritas ketika masyarakat yang sudah terdata menerima bantuan.

Output

- Capaian Hasil Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Capaian hasil menjadikan tolak ukur keberhasilan dari suatu program.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni memiliki tujuan yaitu menjadikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Berdasarkan hasil wawancara program ini dapat dikatakan berhasil karena sesuai dengan tujuan program. Capaian hasil tidak bisa serta merta dikatakan berhasil karena belum ada kebijakan maupun program yang dibuat oleh pemerintah dengan sempurna, tentunya ada kendala ataupun permasalahan didalamnya sehingga harus dievaluasi. Kalau dari segi tujuan program ini sudah sesuai dengan tujuan.

- Pelestarian Nilai gotong royong

Program RRTLH merupakan program yang dimana didalam pelaksanaannya menggunakan swadaya dari masyarakat, sehingga untuk pelaksanaan perehaban masyarakat saling membantu satu sama lain sehingga tercipta rasa kebersamaan dan gotong royong antar warga

- Masih Banyaknya RTLH di Kabupaten Purbalingga

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan program yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan alokasi dana yang dikeluarkan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, sudah terdata sebanyak 27.533 RTLH yang nantinya akan dijadikan RLH.

Namun, didalam kondisi senyatanya, alokasi dana yang terbatas menyebabkan tingkat prioritas dalam pembangunan dilakukan dengan melihat tingkat keparahan rumah. Tahun 2015 program RRTLH ini hanya dapat mengurangi 100 RTLH yang sudah menjadi RLH.

Outcome

- Penjelasan Kebijakan program RTLH sesuai prioritas kebutuhan Kab.Purbalingga

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan suatu program yang mengacu pada Perbup no 95 tahun 2015 yang dimana program rehabilitasi RTLH ini merupakan salah satu prioritas pembangunan yang ada di Kab.Purbalingga, hal ini tercantum didalam RPJMD Kab.Purbalingga pembangunan perdesaan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang salah satu poinnya berfokus pada Pemenuhan kebutuhan pangan dan papan, terutama bagi keluarga miskin, Pemantapan pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga miskin; pemantapan ketahanan pangan berbasis potensi lokal; penuntasan pemenuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin; fasilitasi penyediaan rumah sehat sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- Pengelolaan Program Belum Merata

Program Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni merupakan program yang dilaksanakan dengan sistem bertahap. Bertahap disini dalam arti bahwa untuk tahun 2015 penganggaran hanya 1milyar untuk 100 rumah dengan alokasi dana 10juta setiap rumahnya. Sedangkan untuk tahun 2016 akan dialokasikan sebesar 17 milyar untuk 1700 rumah dan alokasi dana sama yaitu 10 juta setiap rumahnya. Hal ini dapat terjadi karena anggaran yang terbatas, sehingga program ini memang sudah sewajarnya jika dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, dan untuk perehaban rumah digunakan sistem penomoran rumah. Penomoran tersebut berdasarkan tingkat prioritas yaitu keparahan rumah.

Benefit

- Tercapainya Standart Kelayakan Rumah

Program RRTLH merupakan suatu program dalam rangka mengatasi kemiskinan bagian papan. Program ini memiliki tujuan yaitu menjadikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Didalam pencapaiannya terdapat standart didalamnya yaitu alas, atap dan dinding.

- Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga Miskin

Dalam program Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni memberikan manfaat berupa :

- Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin
- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Manfaat yang dihasilnya oleh program ini merupakan manfaat langsung dapat dirasakan, karena, masyarakat nantinya akan menempati rumah yang telah di rehab. Hal ini menunjukkan bahwa program ini merupakan program yang bagus untuk melengkapi kebutuhan papan masyarakat miskin penerima bantuan yang memiliki rumah tidak layak huni.

Impact

- Derajat Kesehatan Meningkat

Sasaran dari program ini yaitu masyarakat atau warga yang sudah terdaftar rumahnya tidak layak huni untuk direhab menjadi layak huni. Berdasarkan hasil wawancara program ini diharapkan nantinya akan memiliki dampak yang lebih luas yaitu meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin, yang awalnya tidak memiliki pola hidup bersih, setelah memiliki RLH diharapkan akan memiliki pola hidup bersih dan sehat

- Pencapaian Hasil Menjadi Solusi dari Permasalahan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kompleks, terdapat kemiskinan struktural maupun kultural. Kemiskinan sudah menjadi prioritas didalam permasalahan nasional, tentunya akan menjadi suatu permasalahan serupa yang ada di daerah, mungkin tidak semua daerah menjadikan permasalahan kemiskinan menjadi suatu prioritas, namun di Kabupaten Purbalingga, masalah mengenai kemiskinan dijadikan suatu permasalahan yang prioritas, hal ini sesuai dengan RPJMD 2010-2015, oleh karena itu Bappeda Kabupaten Purbalingga merumuskan suatu program kemiskinan berupa Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Sebenarnya, program ini bukanlah program satu-satunya didalam mengatasi permasalahan kemiskinan, program ini hanyalah salah satu program kemiskinan guna membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal “papan”.

**Formulir Evaluasi Kinerja Kegiatan (Ek-1)
Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten
Purbalingga**

No	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian (%)	Bobot (%)	Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga	Kegiatan Merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni di Kabupaten Purbalingga	a. <i>Input</i>	91,6	15	13,74
			b. <i>Output</i>	75,84	15	11,37
			c. <i>Outcome</i>	63,76	20	12,75
			d. <i>Benefit</i>	100	25	25
			e. <i>Impact</i>	58	25	14,4
			Jumlah nilai capaian kegiatan		100	77,26

Sumber : Analisis Peneliti

Berdasarkan tabel 4.6 didapatkan informasi bahwa nilai capaian untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga sebesar 76,85% dan dikategorikan berhasil meskipun masih terdapat kekurangan serta gap didalamnya. Keberhasilan program ini memang karena dari awal program ini merupakan program hasil evaluasi program yang belum optimal, sehingga didalam perumusan serta pelaksanaan hingga akhir program ini sudah matang.

2. Dampak Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga

- Aspek pemenuhan kebutuhan rumah

Didalam melihat pemenuhan aspek ini diukur berdasarkan kondisi rumah yang awalnya belum direhabilitasi dengan sudah direhabilitasi yaitu alas, atap dan dinding. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya terdapat 27.533 rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Purbalingga dan mulai tahun 2015 sudah ada 100 rumah yang terehab. Kedepannya ditahun 2016 akan ada 1700 rumah yang akan direhab

- Aspek kondisi sosial

- Aspek ini melihat dari adanya kebersamaan serta gotong royong dimana pelaksanaan rehab rumah dilakukan secara swadaya.meskipun pemerintah memberikan bantuan sebesar 10juta, biasanya para pemilik rumah akan menambahkan sendiri baik dari sanak saudara maupun dari tetangga yang berkenan untuk saling membantu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kondisi saling gotong royong antar warga.

- Dimensi Dampak

Dye dalam Winarno (2007: 232-235) mengungkapkan bahwa pada dasarnya terdapat 5 dimensi dari suatu dampak kebijakan, yaitu :

- Dampak pada masalah publik (pada kelompok sasaran) yang diharapkan atau tidak.

Kelompok sasaran pada program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah masyarakat yang terdaftar memiliki rumah tidak layak huni. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan 100 rehab rumah yang dimana berdasarkan hasil wawancara dan observasi baik dari pembuat kebijakan maupun penerima kebijakan menyatakan bahwa dampak yang dirasakan sesuai tujuan meskipun belum menyeluruh karena keterbatasan dana

- Dampak pada kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh perumus kebijakan.

dampak yang dirasakan bukan hanya kepada kelompok sasaran melainkan pada kelompok penyelenggara (instrumen terkait) serta masyarakat sekitar. Dampaknya bagi instrumen terkait yaitu adanya kepuasan terhadap capaian kinerja dengan program yang memiliki capaian nilai 76,85, menandakan bahwa program tersebut sudah baik meskipun masih terdapat gap dan belum merata, dan belum

menyelesaikan permasalahan kemiskinan karena program ini hanya bertujuan untuk mengentaskan permasalahan papan, sedangkan dampak bagi masyarakat sekitar yang tidak menerima bantuan adalah adanya saling gotong-royong karena unuk rehab rumah menggunakan bantuan tenaga swadaya

- Dampak sekarang dan akan datang yang berpengaruh terhadap kelompok sasaran.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni memang memiliki dampak yang langsung dirasakan maupun dampak nanti yang akan datang. Dampak yang dirasakan saat ini yaitu mereka sudah memiliki rumah layak huni dan bisa langsung ditempati, sedangkan untuk tidak langsung atau jangka kedepan, nantinya setelah semua rumah tidak layak huni direhab maka akan meningkatkan taraf hidup kesehatan serta hidup bersih

- Dampak biaya langsung dikeluarkan untuk membiayai program yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan sehingga dapat terlaksana sedemikian rupa.

Biaya langsung yang dikeluarkan oleh penerima bantuan itu hanya sesuai kemampuan dan kemauan saja (swadaya). Karena untuk alokasi dana Rp.10.000.000 sudah mengcover untuk rehab atap, alas dan dinding yang sesuai dengan standart rumah sehat.

- Dampak biaya tak langsung dikeluarkan untuk membiayai program.

Biaya tak langsung yang dikeluarkan berupa biaya yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat penerima bantuan, dikatakan tidak langsung karena jumlah uang yang dialokasikan didistribusikan kepada penerima bantuan sudah berbentuk material bukan uang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah dilakukan penilaian kinerja kegiatan pada setiap indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*, maka dilakukanlah evaluasi dengan cara mengambil hasil setiap capaian kinerja kegiatan kemudian memberikan pembobotan untuk kemudian diperoleh nilai capaian program. Adapun evaluasi kinerja program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yaitu memiliki nilai sebesar 76,85 Jadi kategori hasil evaluasi program jika menurut DRD JATENG nilai 76,85 masuk dalam kategori program yang berhasil. Meskipun program ini berhasil namun masih terdapat beberapa kendala didalamnya diantaranya, terbatasnya SDM yang ada, ketidak tepatan waktu karena cuaca yang tidak mendukung dan masyarakat sekitar masih menganut sistem hari baik, didalam proses penyelesaian rehab rumah, adanya keterlambatan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, serta

belum tercapainya tujuan secara merata karena program ini merupakan program yang bertahap.

Saran

1. Menambahkan SDM lagi karena SDM yang terbatas meskipun sudah optimal didalam kinerja, mungkin untuk tahun depan dapat digunakan sistem *open rekrutment* agar SDM bertambah.
2. Lebih meningkatkan koordinasi terkait pelaksana teknis
3. Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 27.533 rumah sebaiknya memiliki target penyelesaian agar hasilnya langsung dirasakan secara merata, sebagai contoh jika alokasi dana konsisten sebesar 17milyar maka pembangunan tersebut akan selesai 16 tahun mendatang.
4. Sebaiknya program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni didukung dengan program lainnya sehingga tercipta suatu sinergi dan saling mendukung antar program.
5. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni memang program yang bagus, namun alangkah baiknya jika terdapat program yang membangun SDM.
6. Sebaiknya daerah Kabupaten Purbalingga memperbanyak

program daerah (bukan dari pusat) untuk mengentaskan kemiskinan, karena RRTLH hanya salah satu pemenuhan keputusan primer yaitu papan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintahan Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani.2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono.2009.*Metode Penelitian Kuanitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Azwar. S., 2011, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif,Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penerjemah AchmadFawaid.
- Adimihardja, Kusnaka & Hikmat, Harry.2003.Participatory Research Appraisal : *Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Supriyono.2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Nurhadi.2007. *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta : Media Wacana
- Arikunto dan Safrudin, 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno, Budi.2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- RPJMD Kab.Purbalingga
- LAN & BPKP. *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 2000
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Winarno, Budi.2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : PT.Buku Kita
- Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Cipi Safrudin .2008. *Evaluasi Program Pendidikan*.Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jody L. Fitzpatrick, Blaine R. Worthen, dan James R. Sanders .*Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guideliness*. Boston : Person Education, 2004
- Uno Hamzah dan Lamatenggo Nina. 2012. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara